

Etika Lingkungan Dalam Pembangunan Perumahan Subsidi di Kota Palu: Telaah Filsafat Ekologi

Mursyidul Haq Firmansyah¹, Arrasikhu Fililmi²

¹ UIN Datokarama Palu and mursyidulhaqf@uindaatokarama.ac.id

² UIN Datokarama Palu and Klasikmiring321@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan etika lingkungan dalam pembangunan perumahan subsidi di Kota Palu melalui perspektif filsafat ekologi. Latar belakang penelitian ini berangkat dari meningkatnya pembangunan perumahan bersubsidi yang berkontribusi pada perubahan tata ruang dan penurunan kualitas lingkungan, seperti berkurangnya lahan hijau dan terganggunya sistem drainase alami. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan kerangka analisis filsafat ekologis yang menekankan relasi moral antara manusia dan alam. Data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara dengan Dinas Perumahan dan pengembang, serta masyarakat penghuni perumahan subsidi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan perumahan subsidi masih berorientasi pada aspek sosial-ekonomi, sementara dimensi ekologis belum menjadi prioritas. Pemerintah dan pengembang belum sepenuhnya menerapkan prinsip green housing maupun kebijakan berbasis etika lingkungan. Selain itu, kesadaran ekologis masyarakat penghuni juga masih rendah. Melalui telaah filsafat ekologi, khususnya gagasan deep ecology dari Arne Naess dan land ethic dari Aldo Leopold, penelitian ini menemukan bahwa krisis lingkungan yang terjadi merupakan bentuk krisis moral dan kesadaran ekologis. Oleh karena itu, pembangunan perumahan perlu diarahkan pada paradigma ekosentris yang menempatkan manusia dan alam sebagai satu kesatuan etis. Kesimpulannya, penerapan etika lingkungan dan filsafat ekologi dapat menjadi dasar normatif bagi pembangunan perumahan berkeadilan ekologis, yang menyeimbangkan kebutuhan sosial dengan kelestarian ekosistem di Kota Palu.

Kata Kunci: Etika Lingkungan, Perumahan Subsidi, Kota Palu, Filsafat Ekologi, Keberlanjutan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of environmental ethics in the development of subsidized housing in Palu City through the perspective of ecological philosophy. The background of this research is based on the increasing development of subsidized housing, which has contributed to spatial changes and declining environmental quality, such as the reduction of green areas and the disruption of natural drainage systems. This study employs a descriptive qualitative approach with an ecological philosophical framework that emphasizes the moral relationship between humans and nature. Data were obtained through field observations, interviews with the Housing Agency and developers, as well as residents of subsidized housing. The findings indicate that the development of subsidized housing is still oriented toward socio-economic aspects, while the ecological dimension has not yet become a priority. The government and developers have not fully implemented the principles of green housing or policies based on environmental ethics. In addition, the ecological awareness of residents remains relatively low. Through the lens of ecological philosophy, particularly Arne Naess's concept of deep ecology and Aldo Leopold's land ethic, this study finds that the environmental crisis that occurs is a manifestation of a moral crisis and a lack of ecological awareness. Therefore, housing development needs to be directed toward an ecocentric paradigm that places humans and nature as an ethical unity. In conclusion, the application of environmental ethics and ecological philosophy can serve as a normative foundation for ecologically just housing development, balancing social needs with ecosystem sustainability in Palu City.

Keywords: Environmental Ethics, Subsidized Housing, Palu City, Ecological Philosophy, Sustainability.

PENDAHULUAN

Pembangunan perumahan subsidi merupakan salah satu strategi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat berpenghasilan rendah akan hunian yang layak. Di Kota

Palu, program ini menjadi bagian penting dari upaya pemulihan dan pemerataan pembangunan pasca-bencana 2018. Namun, di balik keberhasilan sosial dan ekonomi yang ingin dicapai, terdapat persoalan ekologis yang perlu dikaji secara lebih mendalam, terutama terkait dengan dampak pembangunan terhadap lingkungan alam. Dalam konteks pembangunan modern, relasi manusia dan alam sering kali bersifat antroposentris, di mana manusia menjadi pusat segala pertimbangan dan alam hanya dipandang sebagai objek eksploitasi demi kepentingan ekonomi. Paradigma ini tampak dalam praktik pembangunan perumahan yang kurang memperhatikan daya dukung lingkungan, seperti alih fungsi lahan hijau, penebangan vegetasi alami, dan perubahan kontur tanah yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem setempat.

Fenomena ini menimbulkan sejumlah persoalan lingkungan, seperti berkurangnya area resapan air, peningkatan suhu mikro, serta risiko bencana ekologis seperti banjir dan longsor. Alih fungsi lahan dari area hijau atau pertanian ke perumahan mengakibatkan penurunan daya dukung ekologis wilayah. Setiap hektar lahan yang dialihfungsikan berarti berkurangnya kemampuan tanah untuk menyerap air, menahan erosi, dan mendukung keanekaragaman hayati. Menurut Supriyanto¹ konversi lahan yang tidak terkendali mengubah struktur ruang kota dan memperlemah fungsi ekologis ruang terbuka hijau (RTH) yang seharusnya minimal 30% dari luas wilayah perkotaan. Selain itu pembangunan perumahan yang menggantikan ekosistem alami (seperti rawa, semak, atau hutan kecil) menyebabkan hilangnya habitat flora dan fauna lokal. Dampak ini bersifat kumulatif dan mengarah pada penurunan biodiversitas wilayah.

Proses pembangunan perumahan menyebabkan peningkatan permukaan kedap air (aspal, beton, paving) yang menurunkan kemampuan tanah menyerap air hujan. Akibatnya, potensi banjir lokal dan genangan meningkat, sementara kualitas air tanah menurun akibat infiltrasi limbah domestik. Studi yang dilakukan oleh Kodoatie & Sjarief menunjukkan bahwa pembangunan permukiman di daerah dataran rendah tanpa sistem drainase ekologis dapat meningkatkan potensi banjir hingga 40% pada musim hujan². Selain itu pengurangan vegetasi alami di kawasan perumahan menyebabkan berkurangnya penyerapan karbon dan peningkatan suhu mikro *urban heat island effect*. Ini berdampak langsung pada kenyamanan termal warga dan keseimbangan iklim lokal. Daly menyebutkan bahwa pembangunan ekonomi tanpa perhitungan ekologis akan menciptakan “pertumbuhan tak berkelanjutan”, di mana keuntungan sosial jangka pendek dibayar dengan kerusakan lingkungan jangka panjang³. Dan khusus di Kota Palu yang rawan gempa dan likuefaksi, pembangunan perumahan tanpa kajian geoteknik yang matang dapat meningkatkan risiko kerusakan lingkungan dan korban jiwa. Banyak perumahan subsidi dibangun di atas tanah lempung jenuh air yang berpotensi likuefaksi. Sehingga Badan Geologi⁴ menegaskan pentingnya zonasi rawan bencana dalam pengaturan tata ruang untuk mencegah risiko ekologis dan sosial di wilayah Sulawesi Tengah.

Dalam konteks pembangunan, etika lingkungan berfungsi sebagai kompas moral yang mengarahkan kebijakan agar tidak semata mengejar pertumbuhan ekonomi, melainkan juga menjaga keseimbangan ekologis dan keadilan antar-generasi. Prinsip ini sejalan dengan gagasan

¹ Supriyanto, Bambang. (2018). “Alih Fungsi Lahan dan Implikasinya terhadap Tata Ruang Kota.” *Jurnal Tata Kota dan Lingkungan*, 10(2), 87–99.

² Kodoatie, R. J., & Sjarief, R. (2010). *Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu*. Yogyakarta: Andi Press.

³ Daly, Herman E. (1996). *Beyond Growth: The Economics of Sustainable Development*. Boston: Beacon Press.

⁴ Badan Geologi Indonesia. (2021). *Zonasi Rawan Bencana Geologi di Sulawesi Tengah*. Bandung: Kementerian ESDM.

pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Menurut Keraf (2010), pembangunan yang berlandaskan etika lingkungan menempatkan alam bukan sebagai objek eksploitasi, melainkan sebagai mitra kehidupan yang memiliki nilai intrinsik dan hak untuk dilestarikan⁵. Kebanyakan kebijakan pembangunan di negara berkembang, termasuk Indonesia, masih bersifat antropocentris berpusat pada kepentingan manusia. Etika lingkungan menuntut pergeseran ke paradigma ekosentris, yang mengakui bahwa semua makhluk hidup dan unsur alam memiliki nilai moral yang setara dalam sistem ekologis⁶. Etika lingkungan juga memperluas konsep keadilan, tidak hanya antar-manusia (intragenerasi), tetapi juga antar-generasi dan antar-spesies. Dengan demikian, pembangunan yang berkelanjutan tidak boleh merusak sumber daya yang dibutuhkan oleh generasi mendatang. Daly menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang tidak mengorbankan kapasitas generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri⁷.

Menurut Capra etika lingkungan memiliki tiga relevansi utama terhadap arah kebijakan pembangunan berkelanjutan seperti menjadi dasar nilai dan prinsip moral dalam pembuatan kebijakan. Mendorong pembentukan kebijakan yang berbasis *eco-policy* yaitu kebijakan yang mengintegrasikan penilaian ekologis dalam setiap tahap pembangunan. Dan mampu mengubah cara pandang masyarakat dan pemerintah dari “pembangunan untuk manusia” menjadi “pembangunan bersama alam”, Guna menekankan bahwa keberlanjutan sejati hanya dapat tercapai bila kebijakan didasarkan pada kesadaran ekologis, bukan sekadar efisiensi ekonomi.⁸ Melalui perspektif etika lingkungan, relasi antara manusia dan alam seharusnya bersifat ekosentris, di mana manusia menjadi bagian dari sistem ekologis yang saling bergantung. Etika ini menuntut adanya kesadaran moral bahwa pembangunan harus menghormati hak-hak ekologis alam, menjaga keberlanjutan sumber daya, dan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan sosial dan kelestarian lingkungan. Dari penjelasan di atas penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Bagaimana penerapan etika ekologis dalam perencanaan kawasan perumahan subsidi di Kota Palu dan Sejauh mana nilai-nilai filsafat lingkungan diterapkan dalam kebijakan pembangunan rumah subsidi.

LANDASAN TEORI

A. Etika Lingkungan

Etika lingkungan merupakan cabang etika yang membahas hubungan moral antara manusia dan alam. Dalam perspektif ini, alam tidak hanya dipandang sebagai objek pemanfaatan ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan yang harus dijaga keberlanjutannya. Etika lingkungan menekankan bahwa setiap aktivitas pembangunan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem, termasuk tanah, air, udara, ruang hijau, dan kehidupan masyarakat.⁹

⁵ Keraf, A. Sonny. (2010). *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kompas.

⁶ Naess, Arne. (1989). *Ecology, Community and Lifestyle: Outline of an Ecosophy*. Cambridge: Cambridge University Press.

⁷ Daly, Herman E. (1996). *Beyond Growth: The Economics of Sustainable Development*. Boston: Beacon Press.

⁸ Capra, Fritjof. (1997). *The Web of Life: A New Scientific Understanding of Living Systems*. New York: Anchor Books

⁹ Keraf, 2010; 112

Dalam konteks pembangunan perumahan subsidi di Kota Palu, etika lingkungan digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah, pengembang, dan masyarakat memperhatikan tanggung jawab ekologis. Pembangunan rumah subsidi tidak cukup hanya berorientasi pada penyediaan hunian murah, tetapi juga harus memperhatikan daya dukung lingkungan, sistem drainase, ruang terbuka hijau, dan kualitas permukiman.¹⁰

B. Filsafat Ekologi

Filsafat ekologi memandang manusia sebagai bagian dari jaringan kehidupan alam. Pandangan ini menolak cara berpikir antroposentris yang menempatkan alam hanya sebagai alat pemenuhan kebutuhan manusia. Sebaliknya, filsafat ekologi menekankan pentingnya keseimbangan relasi antara manusia dan alam.¹¹

Dalam penelitian ini, filsafat ekologi menjadi kerangka kritis untuk melihat pembangunan perumahan subsidi. Jika pembangunan dilakukan tanpa memperhatikan resapan air, vegetasi, ruang hijau, dan kelestarian lingkungan, maka pembangunan tersebut menunjukkan lemahnya kesadaran ekologis. Oleh karena itu, pembangunan perumahan perlu diarahkan pada paradigma ekosentris, yaitu cara pandang yang menempatkan manusia dan alam sebagai satu kesatuan etis.¹²

C. Deep Ecology dan Land Ethic

Teori *deep ecology* Arne Naess menekankan bahwa alam memiliki nilai intrinsik, bukan hanya nilai guna bagi manusia. Konsep ini relevan untuk mengkritik pembangunan perumahan yang hanya mengejar aspek ekonomi dan kuantitas rumah, tetapi mengabaikan keberlanjutan lingkungan.

Sementara itu, gagasan *land ethic* Aldo Leopold memandang tanah, air, tumbuhan, dan makhluk hidup sebagai bagian dari komunitas moral. Manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas dan keseimbangan komunitas ekologis tersebut. Dalam konteks perumahan subsidi, lahan tidak boleh hanya dipahami sebagai komoditas pembangunan, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem yang harus dijaga.¹³

D. Arsitektur Ekologis dan Permukiman Berkelanjutan

Arsitektur ekologis adalah pendekatan pembangunan yang memperhatikan hubungan antara bangunan, manusia, dan lingkungan. Prinsip ini mencakup penggunaan lahan secara bijak, penyediaan ruang terbuka hijau, sistem drainase yang baik, pengelolaan air dan sampah, serta penggunaan material yang ramah lingkungan. Perumahan subsidi yang ideal tidak hanya murah dan layak huni, tetapi juga sehat, ramah lingkungan, dan

¹⁰ Larasati, R. A., & Satwikasari, A. F. (2021). Tinjauan konsep arsitektur ekologi pada kawasan permukiman: Kampung Sruni, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. *Jurnal LINEARS*, 4(2). <https://doi.org/10.26618/j-linears.v4i2.5278>

¹¹ Capra, 1996: 13

¹² Capra, 2004: 16

¹³ Daly, H. E. (1996). *Beyond growth: The economics of sustainable development*. Beacon Press.

berkelanjutan. Karena itu, pembangunan perumahan subsidi di Kota Palu perlu memperhatikan aspek ekologis agar tidak menimbulkan masalah seperti banjir, berkurangnya ruang hijau, dan penurunan kualitas lingkungan permukiman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode hermeneutika filosofis. Tujuannya untuk memahami secara mendalam nilai-nilai etika lingkungan dalam pembangunan perumahan subsidi di Kota Palu melalui interpretasi filosofis dan analisis lapangan. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dipilih untuk menggambarkan fenomena sosial dan ekologis secara naturalistik. Metode deskriptif digunakan untuk menelaah nilai-nilai etika dan filsafat ekologi yang tercermin dalam praktik pembangunan perumahan.

Objek Penelitian secara formal: Etika lingkungan berdasarkan teori filsafat ekologi, dan Objek material: Pembangunan dan tata ruang perumahan subsidi di Kota Palu dan Kabupaten Sigi. Sumber dan Jenis Data, Data primer berupa observasi lapangan, wawancara dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), pengembang, dan penghuni perumahan subsidi. Dan data sekunder: Buku, jurnal ilmiah, dan dokumen pemerintah yang relevan tentang etika lingkungan, arsitektur ekologi, serta pemikiran Capra, Naess, dan Leopold. Teknik Pengumpulan Data terdiri atas Dokumentasi: Mengumpulkan literatur, kebijakan, dan data teknis pembangunan. Observasi: Melihat kondisi nyata lingkungan perumahan, drainase, dan ruang hijau. Dan wawancara: Dilakukan terhadap pejabat pemerintah, pengembang, dan masyarakat penghuni.

Teknik Validitas Data menggunakan triangulasi data, triangulasi peneliti, dan triangulasi metode untuk memastikan keakuratan dan konsistensi informasi dari berbagai sumber. Teknik Analisis Data Analisis dilakukan dengan metode hermeneutika filosofis, mencakup empat tahap:

1. Deskripsi: Menggambarkan realitas lapangan dan data pustaka.
2. Interpretasi: Menafsirkan makna etika lingkungan dari data empiris.
3. Holistika: Melihat hubungan menyeluruh antara manusia dan alam dalam konteks pembangunan.
4. Analisis kritis: Mengevaluasi praktik pembangunan dengan kerangka filsafat ekologi (Naess, Capra, Leopold).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Perencanaan Perumahan Subsidi Di Kota Palu

Kota Palu merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki luas wilayah sekitar 395,06 km², terdiri atas 8 kecamatan dan 46 kelurahan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Palu¹⁴ jumlah penduduk mencapai sekitar 401.000 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 1,2% per tahun. Secara geografis, Palu terletak di lembah Palu wilayah yang dikelilingi pegunungan dan dilalui Sesar Palu-Koro, menjadikannya kawasan rawan bencana gempa dan likuifaksi. Keadaan ini sangat berpengaruh terhadap pola tata ruang dan arah pembangunan perumahan, termasuk perumahan bersubsidi.

¹⁴ BPS Kota Palu. (2023). *Kota Palu Dalam Angka 2023*.

Pasca bencana 28 September 2018 (gempa, tsunami, dan likuifaksi), ribuan unit rumah hancur, dan sebagian kawasan permukiman seperti Petobo, Balaroa, dan Jono Oge dinyatakan tidak layak huni permanen¹⁵. Akibatnya, muncul kebutuhan mendesak akan pembangunan perumahan baru bagi korban bencana dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Berdasarkan data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Palu, terdapat:

- 1) Backlog perumahan: ±20.815 unit (kekurangan rumah layak huni).
- 2) Rumah tidak layak huni (RTLH): ±8.316 unit.
- 3) Kawasan kumuh: Luas sekitar 266 hektar tersebar di 46 kelurahan¹⁶.

Kawasan permukiman baru banyak berkembang di wilayah Palu Timur, Mantikulore, dan Tawaeli, karena daerah ini dinilai relatif aman dari likuifaksi dan memiliki akses lebih baik ke jaringan jalan utama (Jl. Trans Sulawesi, Jl. Untad, dan Jl. Basuki Rahmat). Pemerintah Kota Palu menargetkan pengurangan backlog hingga 50% pada tahun 2026. Dan Penurunan kawasan kumuh menjadi di bawah 10% dari luas permukiman¹⁷.

Pembangunan perumahan subsidi di Kota Palu mengacu pada dua sumber kebijakan: Kebijakan Nasional dan Kebijakan Daerah. Kebijakan Nasional melalui Program FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) dan Subsidi Selisih Bunga (SSB) yang dikelola oleh Kementerian PUPR dan BP Tapera. Bunga KPR ditetapkan tetap sebesar 5% dengan jangka waktu maksimal 20 tahun dengan harga jual rumah subsidi di Palu maksimal sekitar Rp200 juta (tipe 36)¹⁸. Kebijakan Daerah melalui DPKP Kota Palu memfasilitasi penyediaan lahan aman bencana, pemerintah daerah menyediakan prasarana dan utilitas umum (jalan, air bersih, drainase), dan kolaborasi dengan pengembang anggota APERSI Sulawesi Tengah untuk memperbanyak proyek rumah bersubsidi¹⁹.

Pembangunan perumahan subsidi di Kota Palu banyak dilakukan di lahan-lahan pinggir kota yang dulunya merupakan area pertanian dan sempadan sungai. Hal ini berdampak pada berkurangnya vegetasi alami dan meningkatnya potensi banjir musiman.

2. Temuan Lapangan

Penelitian ini dilakukan di beberapa lokasi perumahan subsidi di Kota Palu, antara lain perumahan di wilayah Tondo, Mantikulore dan Ulujadi. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara dengan pihak Dinas Pemerintah, para pengembang, serta masyarakat penghuni.

Dari hasil lapangan, ditemukan beberapa poin penting sebagai berikut:

a. Aspek Tata Ruang dan Lingkungan Fisik

- 1) Alih fungsi lahan: Sebagian besar perumahan subsidi dibangun di area yang sebelumnya merupakan lahan pertanian produktif atau semak belukar alami. Proses ini mengurangi kemampuan tanah menyerap air hujan dan meningkatkan risiko genangan.

¹⁵ BNPB. (2019). *Laporan Penanganan Pascabencana Palu, Donggala, dan Sigi*

¹⁶ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu. (2022). *Renstra DPKP 2021–2026*.

¹⁷ Bappeda Kota Palu. (2023). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026*

¹⁸ Kementerian PUPR. (2024). *Laporan Tahunan FLPP 2023*.

¹⁹ APERSI Sulawesi Tengah. (2025). *Data Proyek Perumahan Subsidi di Kota Palu*.

- 2) Minimnya ruang terbuka hijau: Rata-rata kawasan perumahan hanya memiliki 2–3% dari total luas lahan sebagai area hijau, jauh di bawah standar ideal (minimal 30%). Ruang hijau yang ada lebih bersifat dekoratif daripada fungsional secara ekologis.
- 3) Kualitas drainase buruk: Saluran air di beberapa lokasi dangkal dan tidak terhubung dengan baik ke sistem drainase kota. Hal ini menimbulkan genangan air saat hujan deras, terutama di kawasan Palupi.
- 4) Penataan vegetasi tidak beragam: Pengembang lebih mengutamakan keindahan visual dengan tanaman hias, bukan vegetasi lokal yang dapat mendukung keanekaragaman hayati.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan masih berorientasi pada fungsi ekonomi dan estetika, belum mencerminkan tanggung jawab moral terhadap keseimbangan ekologis. Dalam perspektif etika lingkungan, ini merupakan cerminan paradigma antroposentris manusia memanfaatkan alam semata demi kebutuhan sosialnya tanpa mempertimbangkan hak-hak ekologis lingkungan.

b. Aspek Kebijakan dan Pengawasan Pemerintah

- 1) Keterbatasan kajian lingkungan: Dari hasil wawancara dengan Dinas Perkim, diketahui bahwa tidak semua proyek perumahan subsidi memiliki AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Sebagian hanya menggunakan UKL-UPL (Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan) yang sifatnya administratif.
- 2) Fokus kebijakan pada aspek sosial: Pemerintah daerah lebih menekankan pada penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (*social housing*), bukan pada keberlanjutan ekosistem.
- 3) Kurangnya pengawasan pasca pembangunan: Setelah proyek selesai, pemantauan lingkungan tidak dilakukan secara rutin, terutama terkait drainase, sampah, dan vegetasi.

Ketiadaan pengawasan menunjukkan lemahnya tanggung jawab moral pemerintah terhadap pelestarian alam. Dalam perspektif filsafat ekologi, kebijakan publik semestinya tidak hanya mengedepankan keadilan sosial, tetapi juga keadilan ekologis menjaga keseimbangan antara manusia dan lingkungan sebagai satu kesatuan etis.

c. Aspek Kesadaran Masyarakat Penghuni

- 1) Kesadaran ekologis masih rendah: Dari wawancara dengan beberapa penghuni, sebagian besar tidak memahami prinsip lingkungan berkelanjutan. Sampah rumah tangga sering dibuang sembarangan ke saluran air.
- 2) Minimnya partisipasi warga: Tidak ada program komunitas warga terkait penghijauan, pengelolaan sampah, atau konservasi air hujan.
- 3) Fasilitas lingkungan tidak dimanfaatkan optimal: Misalnya, taman perumahan yang dibuat pengembang jarang dirawat bersama dan sering berubah fungsi menjadi tempat parkir atau area penjemuran.

Kondisi ini mencerminkan krisis kesadaran ekologis (*ecological awareness*) yang menjadi inti persoalan dalam etika lingkungan. Dalam pandangan Arne Naess (*deep ecology*), krisis

lingkungan bukan hanya soal kebijakan atau teknologi, melainkan krisis spiritual manusia terhadap alam hilangnya rasa hormat terhadap kehidupan non-manusia.

d. Aspek Pandangan Pengembang

- 1) Pertimbangan utama ekonomi: Sebagian besar pengembang menyatakan bahwa mereka mengikuti standar pemerintah terkait luas kavling dan infrastruktur dasar, namun belum menjadikan keberlanjutan lingkungan sebagai prioritas karena menambah biaya proyek.
- 2) Belum menerapkan konsep “eco-housing”: Tidak ada penerapan sistem pengelolaan air hujan, penggunaan energi terbarukan, atau material ramah lingkungan.
- 3) Motif sosial lebih menonjol secara formal: Pengembang mengaku mendukung “program sosial pemerintah,” tetapi pada praktiknya tujuan utama tetap ekonomi.

Dalam konteks etika lingkungan, sikap ini mencerminkan moral pragmatis, yaitu keputusan yang diambil berdasarkan efisiensi ekonomi tanpa mempertimbangkan nilai-nilai ekologis intrinsik. Padahal, etika ekologis menuntut adanya tanggung jawab moral kolektif dari setiap aktor pembangunan.

Dari keseluruhan data, tampak bahwa pembangunan perumahan subsidi di Kota Palu masih berada pada tahap “pembangunan teknokratik” yang berorientasi pada penyediaan fisik hunian tanpa paradigma ekologis. Refleksi filsafat ekologi menegaskan bahwa manusia dan alam merupakan satu kesatuan sistem kehidupan. Oleh karena itu, pembangunan ideal seharusnya tidak hanya berorientasi pada *manfaat ekonomi*, tetapi juga pada *nilai moral ekologis*. Dengan menggunakan pendekatan deep ecology, dapat disimpulkan bahwa pembangunan di Kota Palu masih bersifat shallow ecology, yang memandang pelestarian alam hanya sejauh bermanfaat bagi manusia, bukan sebagai tanggung jawab moral terhadap keberlanjutan kehidupan itu sendiri.

3. Analisis Kritis Etika Lingkungan Berdasarkan Temuan Lapangan

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa pembangunan perumahan subsidi di Kota Palu masih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan ekonomi dan sosial tanpa memperhatikan keseimbangan ekologis. Hal ini menandakan terjadinya krisis moral lingkungan, yakni melemahnya kesadaran manusia akan tanggung jawab etis terhadap alam. Sonny Keraf menyebut bahwa akar permasalahan lingkungan bukan semata-mata teknis, melainkan **etis**, karena manusia telah kehilangan rasa hormat terhadap alam sebagai sesama ciptaan yang memiliki nilai intrinsik.²⁰ Pembangunan perumahan subsidi yang mengabaikan daya dukung alam memperlihatkan pandangan bahwa alam hanyalah objek untuk dimanfaatkan, bukan entitas yang memiliki hak untuk dilestarikan. Dalam konteks ini, paradigma pembangunan di Palu masih bersifat antroposentris, yakni menempatkan manusia sebagai pusat nilai moral dan menjadikan alam sekadar alat bagi kepentingan manusia.²¹ Paradigma ini bertentangan dengan etika ekologis yang menekankan hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan secara setara.

Antroposentrisme yang dominan dalam kebijakan perumahan terlihat dari lemahnya perhatian terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan kurangnya ruang terbuka hijau di kawasan perumahan. Dalam wawancara dengan pihak Dinas Perumahan, diakui

²⁰ A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan* (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 24.

²¹ Ibid., hlm. 33

bahwa kebijakan lebih menitikberatkan pada pemerataan akses hunian daripada konservasi ekologis. Padahal, menurut Arne Naess, filsafat *deep ecology* menuntut perubahan radikal dalam cara manusia memandang dirinya terhadap alam bukan sebagai penguasa, melainkan sebagai bagian integral dari jaringan kehidupan (*web of life*)²². Naess menegaskan bahwa semua bentuk kehidupan memiliki nilai intrinsik (*intrinsic value*), sehingga pembangunan yang mengorbankan ekosistem demi kepentingan manusia bertentangan dengan moralitas ekologis yang sejati. Oleh karena itu, diperlukan pergeseran paradigma menuju ekosentrisme, yaitu pandangan yang menempatkan alam dan seluruh makhluk hidup sebagai subjek moral yang memiliki hak untuk hidup dan berkembang.²³ Jika prinsip ini diterapkan, maka pembangunan perumahan subsidi tidak hanya diukur dari manfaat ekonominya, tetapi juga dari kontribusinya terhadap keseimbangan ekologis.

Kelemahan kebijakan lingkungan dalam proyek perumahan subsidi menunjukkan bahwa etika belum sepenuhnya menjadi dasar dalam proses perencanaan pembangunan. Pemerintah daerah cenderung menilai keberhasilan dari aspek fisik dan sosial semata (jumlah rumah terbangun, keterjangkauan harga), sementara aspek ekologis seperti konservasi lahan, kualitas air, dan keanekaragaman hayati sering diabaikan. Holmes Rolston III berpendapat bahwa tanggung jawab moral manusia terhadap lingkungan tidak dapat dilepaskan dari sistem sosial dan politik yang menaunginya²⁴. Jika kebijakan publik tidak berlandaskan kesadaran ekologis, maka praktik pembangunan akan terus melahirkan kerusakan sistemik terhadap alam. Etika lingkungan menuntut agar kebijakan pembangunan selalu mempertimbangkan *nilai moral ekologis* dalam setiap tahap pengambilan keputusan. Dengan demikian, pembangunan perumahan subsidi di Kota Palu perlu direorientasikan menjadi pembangunan yang berkeadilan ekologis, di mana kepentingan manusia ditempatkan secara proporsional dalam konteks keberlanjutan ekosistem.

Dalam praktiknya, para pengembang di Palu lebih menekankan pada efisiensi biaya dan target penjualan. Penerapan prinsip *green housing* dianggap membebani anggaran proyek. Hal ini menggambarkan lemahnya internalisasi nilai-nilai etika lingkungan dalam sektor bisnis perumahan. Menurut Aldo Leopold dalam konsep *land ethic*, manusia harus memperluas batas komunitas moralnya untuk mencakup tanah, air, hewan, dan tumbuhan²⁵. Dengan demikian, keputusan pembangunan seharusnya tidak hanya mempertimbangkan keuntungan finansial, tetapi juga kesejahteraan ekosistem. Sementara itu, kesadaran ekologis masyarakat penghuni perumahan subsidi juga masih rendah. Mereka cenderung bersikap pasif terhadap pengelolaan lingkungan dan belum memahami pentingnya konservasi air, pengelolaan sampah, dan penanaman vegetasi lokal. Hal ini memperkuat pendapat Fritjof Capra bahwa krisis ekologi modern adalah krisis kesadaran manusia telah terputus dari jaring kehidupan dan kehilangan rasa spiritualitas terhadap alam²⁶. Peningkatan pendidikan ekologis bagi warga sangat penting agar nilai-nilai etika lingkungan menjadi kebiasaan sosial, bukan sekadar wacana moral.

4. Telaah Filsafat Ekologi

²² Arne Naess, *Ecology, Community, and Lifestyle: Outline of an Ecosophy* (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), hlm. 28.

²³ Ibid., hlm. 45–46.

²⁴ Holmes Rolston III, *Environmental Ethics: Duties to and Values in the Natural World* (Philadelphia: Temple University Press, 1988), hlm. 67.

²⁵ Aldo Leopold, *A Sand County Almanac* (New York: Oxford University Press, 1949), hlm. 240

²⁶ Fritjof Capra, *The Web of Life: A New Scientific Understanding of Living Systems* (New York: Anchor Books, 1996), hlm. 7–8

Filsafat ekologi merupakan cabang dari filsafat lingkungan yang menelaah secara mendalam relasi ontologis, epistemologis, dan aksiologis antara manusia dan alam. Arne Naess memperkenalkan konsep *deep ecology* sebagai kritik terhadap pendekatan ekologis yang dangkal (*shallow ecology*) yaitu pendekatan yang hanya berfokus pada pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan manusia semata²⁷. Dalam *deep ecology*, manusia tidak lagi dipandang sebagai pusat nilai moral (antroposentris), tetapi sebagai bagian integral dari sistem kehidupan yang lebih luas. Naess menyebutnya sebagai "*the self-realization of all beings*", yakni kesadaran bahwa semua makhluk hidup memiliki nilai dan tujuan intrinsik di luar kepentingan manusia.²⁸ Filsafat ekologi menolak dikotomi antara manusia dan alam. Alam tidak diposisikan sebagai "yang lain" (*the other*), tetapi sebagai bagian dari keberadaan manusia sendiri. Dengan demikian, krisis lingkungan tidak hanya merupakan masalah ekologis, tetapi juga masalah ontologis yaitu kegagalan manusia dalam memahami eksistensinya di tengah sistem kehidupan semesta.²⁹

Secara ontologis, filsafat ekologi memandang manusia bukan sebagai entitas yang terpisah dari alam, melainkan sebagai unsur yang saling terjalin dalam *web of life*.³⁰ Dalam pandangan ini, keberadaan manusia memiliki ketergantungan fundamental pada sistem ekologis. Oleh karena itu, setiap tindakan manusia terhadap alam adalah tindakan terhadap dirinya sendiri. Dalam konteks pembangunan perumahan subsidi di Kota Palu, orientasi antroposentris dalam kebijakan tata ruang menunjukkan keterputusan ontologis antara manusia dan alam. Alam direduksi menjadi objek yang bisa dikonversi menjadi lahan ekonomi. Padahal, dari pandangan filsafat ekologi, alam memiliki "nilai keberadaan" (*intrinsic being*) yang harus dihormati dan dijaga keberlanjutannya.³¹ Dengan demikian, pembangunan perumahan yang merusak vegetasi alami dan mengubah fungsi lahan pertanian mencerminkan kehilangan kesadaran ontologis manusia akan kedudukannya sebagai bagian dari ekosistem.

Dari sisi epistemologi, filsafat ekologi mengkritik cara berpikir modern yang menempatkan alam sebagai objek pengetahuan yang harus dikuasai melalui sains dan teknologi. Cara berpikir ini menghasilkan paradigma mekanistik-reduksionistik, di mana alam dianggap sebagai mesin yang dapat dikendalikan sepenuhnya.³² Sebaliknya, filsafat ekologi menuntut cara pandang holistik dan partisipatif terhadap alam. Pengetahuan ekologis tidak hanya bersifat rasional, tetapi juga etis dan spiritual. Fritjof Capra menyebut bahwa pemahaman terhadap alam harus berakar pada "keterhubungan dinamis" antar makhluk hidup, bukan pada penguasaan dan eksploitasi.³³ Dalam konteks penelitian ini, perencanaan perumahan di Palu menunjukkan bahwa pendekatan teknokratik (yang mengandalkan hitungan lahan dan biaya) masih dominan. Pendekatan ini gagal mengintegrasikan pemahaman ekologis yang menyeluruh. Dengan demikian, epistemologi pembangunan yang digunakan masih meniru paradigma mekanistik, bukan ekologis.

²⁷ Arne Naess, *Ecology, Community, and Lifestyle: Outline of an Ecosophy* (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), hlm. 28

²⁸ Ibid., hlm. 45.

²⁹ A. Sonny Kerat, *Etika Lingkungan* (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 18.

³⁰ Fritjof Capra, *The Web of Life: A New Scientific Understanding of Living Systems* (New York: Anchor Books, 1996), hlm. 8

³¹ Ibid., hlm. 12.

³² E.F. Schumacher, *Small Is Beautiful: Economics as if People Mattered* (New York: Harper & Row, 1973), hlm. 54

³³ Fritjof Capra, *The Hidden Connections* (New York: Anchor Books, 2002), hlm. 25.

Dari sisi aksiologi (nilai), filsafat ekologi berupaya mengembalikan moralitas manusia terhadap alam. Alam tidak hanya bernilai instrumental berguna sejauh ia memenuhi kebutuhan manusia tetapi memiliki nilai intrinsik, yakni nilai yang melekat pada keberadaannya sendiri.³⁴ Dalam perspektif ini, setiap makhluk memiliki hak untuk hidup dan berkembang tanpa harus dinilai berdasarkan kepentingannya bagi manusia. Prinsip ini selaras dengan pandangan Aldo Leopold dalam *land ethic* yang menegaskan bahwa “sesuatu dikatakan benar apabila ia menjaga keutuhan, kestabilan, dan keindahan komunitas biotik; dan salah apabila ia cenderung merusaknya.”³⁵ Dengan demikian, pembangunan perumahan subsidi yang mengabaikan keberlanjutan lingkungan bukan hanya masalah teknis, tetapi juga pelanggaran etis terhadap komunitas biotik. Etika lingkungan yang berakar dari filsafat ekologi menuntut adanya tanggung jawab moral dalam setiap kebijakan pembangunan baik oleh pemerintah, pengembang, maupun masyarakat penghuni.

Telaah filsafat ekologi memiliki implikasi praktis bagi konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Pembangunan yang sejati bukan hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, melainkan pada keseimbangan antara kesejahteraan manusia dan keberlanjutan ekosistem.³⁶ Dalam konteks Palu, penerapan filsafat ekologi berarti menanamkan kesadaran bahwa pembangunan perumahan subsidi harus:

- 1) Menghormati daya dukung alam sebagai batas moral;
- 2) Menyediakan ruang terbuka hijau sebagai bagian dari hak ekologis;
- 3) Mengintegrasikan partisipasi masyarakat dalam menjaga ekosistem;
- 4) Menjadikan kebijakan lingkungan sebagai fondasi utama, bukan pelengkap administratif.

Dengan demikian, filsafat ekologi tidak hanya berfungsi sebagai kerangka teoretis, tetapi juga sebagai pedoman normatif dan etis untuk mengarahkan pembangunan menuju keadilan ekologis.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, analisis etika lingkungan, dan telaah filsafat ekologi, dapat disimpulkan beberapa hal pokok sebagai berikut:

A. Pembangunan Perumahan Subsidi Belum Berlandaskan Kesadaran Ekologis

Pembangunan perumahan subsidi di Kota Palu masih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sosial-ekonomi semata. Faktor ekologis seperti daya dukung lahan, keberlanjutan air tanah, dan ketersediaan ruang terbuka hijau belum menjadi pertimbangan utama. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pembangunan masih dikuasai oleh paradigma antroposentris, yang menempatkan manusia sebagai pusat nilai moral dan menjadikan alam sekadar instrumen untuk memenuhi kebutuhan hidup.

³⁴ Holmes Rolston III, *Environmental Ethics: Duties to and Values in the Natural World* (Philadelphia: Temple University Press, 1988), hlm. 67.

³⁵ Aldo Leopold, *A Sand County Almanac* (New York: Oxford University Press, 1949), hlm. 240.

³⁶ United Nations, *Our Common Future (The Brundtland Report)* (Oxford: Oxford University Press, 1987), hlm. 43

B. Lemahnya Implementasi Etika Lingkungan dalam Kebijakan dan Praktik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah dan pengembang belum sepenuhnya menerapkan prinsip etika lingkungan. Analisis dampak lingkungan (AMDAL) dan pengawasan pasca pembangunan belum optimal. Selain itu, kesadaran ekologis masyarakat penghuni juga masih rendah, sehingga pengelolaan lingkungan perumahan sering diabaikan. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya tanggung jawab moral kolektif terhadap kelestarian alam suatu hal yang dalam etika lingkungan dianggap sebagai bentuk defisit moral ekologis.

C. Perspektif Filsafat Ekologi Menawarkan Paradigma Alternatif

Melalui telaah filsafat ekologi, khususnya gagasan *deep ecology* dari Arne Naess dan *land ethic* dari Aldo Leopold, dapat dipahami bahwa pembangunan berkelanjutan menuntut transformasi kesadaran moral dari paradigma antroposentris menuju ekosentris. Paradigma ini mengakui nilai intrinsik semua makhluk hidup dan menempatkan manusia sebagai bagian dari jaringan kehidupan (*web of life*). Dengan cara pandang ini, pembangunan perumahan bukan sekadar proyek fisik, melainkan bagian dari tanggung jawab moral terhadap keberlanjutan ekosistem.

REFERENSI

- Agisna, M. R., Baehaki, B., & Kuncoro, H. B. B. (2022). Evaluasi kesesuaian struktur rumah tinggal sederhana dengan pedoman teknis rumah tinggal tahan gempa: Studi kasus perumahan subsidi di Kota Cilegon. *Fondasi: Jurnal Teknik Sipil*, 11(1). <https://doi.org/10.36055/fondasi.v0i0.14543>
- Badan Pusat Statistik Kota Palu. (2024). *Kota Palu dalam angka 2024*. BPS Kota Palu.
- Capra, F. (1996). *The web of life: A new scientific understanding of living systems*. Anchor Books.
- Capra, F. (2004). *The hidden connections: A science for sustainable living*. Anchor Books.
- Daly, H. E. (1996). *Beyond growth: The economics of sustainable development*. Beacon Press.
- Firly, A., dkk. (2019). *Arsitektur ekologis: Pendekatan ramah lingkungan dalam desain bangunan*. ITB Press.
- Frick, H. (2007). *Pengantar arsitektur ekologis*. Kanisius.
- Habaora, F. (2020). Konsep perbaikan kerusakan lingkungan berdasarkan falsafah sains Fritjof Capra. *Kebudayaan*, 15(1), 41–52. <https://doi.org/10.24832/jk.v15i1.327>
- Indonesia. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman*.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau*.
- Kaelan. (2005). *Metode penelitian kualitatif bidang filsafat*. Paradigma.
- Keraf, A. S. (2010). *Etika lingkungan hidup*. Kompas.
- Keraf, A. S. (2014). *Etika lingkungan: Pembangunan berkelanjutan dan kesadaran ekologis*. Penerbit Buku Kompas.
- Kodoatie, R. J., & Sjarief, R. (2008). *Banjir: Beberapa penyebab dan metode pengendaliannya dalam perspektif lingkungan*. Andi.
- Larasati, R. A., & Satwikasari, A. F. (2021). Tinjauan konsep arsitektur ekologi pada kawasan permukiman: Kampung Sruni, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. *Jurnal LINEARS*, 4(2). <https://doi.org/10.26618/j-linears.v4i2.5278>
- Leopold, A. (1949). *A sand county almanac: With essays on conservation from Round River*. Oxford University Press.
- Munir, M. I. A. (2023). *Etika lingkungan dan tanggung jawab moral manusia terhadap alam*. Prenada Media.
- Naess, A. (1989). *Ecology, community and lifestyle: Outline of an ecosophy*. Cambridge University Press.
- Patton, M. Q. (2009). *Qualitative research and evaluation methods*. Sage Publications.
- Rolston, H., III. (1988). *Environmental ethics: Duties to and values in the natural world*. Temple University Press.
- Supriyanto, B. (2012). *Ruang terbuka hijau dan keseimbangan ekologis kota*. Gadjah Mada University Press.